



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat atas angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi saat ini sangat tinggi di Sumatera Barat;
 - b. bahwa untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan sewa khusus dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat, perlu diatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa perlu adanya payung hukum agar penyelenggaraan angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi dapat terlaksana secara tertib dan teratur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana

Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
6. Pemberi izin adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum

- yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
 11. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara dan teratur.
 12. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 13. Angkutan Sewa Khusus adalah angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
 14. Perusahaan Aplikasi adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi.
 15. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
 16. Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus adalah Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
 17. Pemilik Angkutan Sewa Khusus adalah pemilik kendaraan yang dioperasikan untuk Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
 18. Dokumen Perjalanan yang Sah adalah dokumen yang melekat pada kendaraan bermotor umum berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji, dan kartu pengawasan yang masih berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Peraturan Gubernur ini, yaitu :
 - a. terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. terwujudnya kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum ; dan
 - c. terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.
- (2) Tujuan pengaturan Peraturan Gubernur ini, yaitu :
 - b. terwujudnya pelayanan angkutan orang dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat; dan
 - c. terwujudnya pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dengan Angkutan Sewa Khusus yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar dan terjangkau.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. angkutan sewa khusus;
- b. perizinan;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :

- a. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;

- b. tidak terjadwal;
- c. pelayanan dari pintu ke pintu;
- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
- e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
- f. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
- g. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
- h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang atau Mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang paling sedikit 1.000 (seribu) *centimeter cubic* dan usia maksimal kendaraan 10 (sepuluh) tahun;
 - b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum dan latar belakang logo Perhubungan;
 - e. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan dan tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
 - f. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan

masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa;

- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan tarif Angkutan Sewa Khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
- (2) Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang seluruhnya berada dalam 1 (satu) daerah provinsi berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 7

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

Pasal 8

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum, meliputi :

- a. pemberian layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin Angkutan Sewa Khusus;
- b. pemberian layanan akses aplikasi kepada perorangan;
- c. perekrutan pengemudi;
- d. penetapan tarif; dan
- e. pemberian promosi tarif dibawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit :

- a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
- b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampung hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
- c. mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang berdomisili di Indonesia;
- d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
- e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat, wajib :
 - a. memberikan akses digital dashboard kepada pemberi izin;
 - b. memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum;
 - c. mentaati dan melaksanakan tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor di kota sesuai dengan wilayah operasi.
- (2) Akses digital dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat;
 - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bekerjasama;
 - c. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
 - d. akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan
 - e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan

surat elektronik (email) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

Bagian Kedua

Perencanaan Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus

Pasal 11

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus, mempertimbangkan :
 - a. potensi bangkitan perjalanan; dan
 - b. perkiraan kebutuhan jasa angkutan.
- (2) Perencanaan penyusunan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan paling sedikit :
 - a. jumlah bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan dan pengukuran variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan; dan
 - d. perhitungan kebutuhan kendaraan.
- (3) Perhitungan dan perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan pendekatan formula perhitungan kebutuhan angkutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan diumumkan kepada masyarakat.

- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Wilayah Operasi

Pasal 13

- (1) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
 - b. perkembangan Daerah;
 - c. karakteristik daerah/wilayah; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Sewa Khusus, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemberi izin.
- (3) Pemberian izin diprioritaskan kepada perusahaan angkutan umum yang ada di Daerah.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Badan usaha milik negara;
 - b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Perseroan terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Bagian Kedua
Bentuk Perizinan

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan dalam bentuk dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik, yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. nomor induk perusahaan;
 5. nama pimpinan perusahaan;

6. alamat perusahaan; dan
 7. masa berlaku izin.
- b. surat pelaksanaan keputusan izin, paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 5. masa berlaku izin; dan
 6. wilayah operasi;
- c. lampiran surat keputusan izin berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. nomor kartu pengawasan;
 4. tanda nomor kendaraan bermotor;
 5. merek Kendaraan;
 6. tahun pembuatan;
 7. daya angkut orang;
 8. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
 9. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon di atas materai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nama pimpinan perusahaan;
 - e. masa berlaku kartu pengawasan;
 - f. wilayah operasi;
 - g. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - h. nomor uji kendaraan bermotor; dan
 - i. daya angkut orang;
- (4) Bentuk/format surat keputusan izin, surat pelaksanaan keputusan izin, kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum

dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 18

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 19

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengembangkan usaha di Kabupaten/Kota lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pasal 20

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berupa:

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaruan masa berlaku izin dan/atau kartu pengawasan; dan
- c. perubahan dokumen izin.

Pasal 21

- (1) Izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - k. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (2) Dalam hal badan hukum berbentuk koperasi, pemenuhan persyaratan administrasi berupa bukti pengesahan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.

Pasal 22

- (1) Pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari :
 - a. pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - b. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan.
- (2) Pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) yang masih berlaku;
 - d. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji kendaraan yang masih berlaku.
 - e. laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) yang masih berlaku; dan
 - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan berupa buku uji/kartu lulus uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 23

- (1) Perubahan dokumen izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari :
 - a. penambahan kendaraan;
 - b. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;

- c. perubahan identitas perusahaan; dan/atau
 - d. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.
- (2) Perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Pemberi izin wajib dilengkapi dengan :
- a. laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan surat keputusan izin Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki.
- (3) Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan wajib dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. salinan surat keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
- (4) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. perubahan nama perusahaan;
 - b. perubahan alamat perusahaan; atau
 - c. perubahan direksi perusahaan.
- (5) Perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberlakukan sebagai pemohon izin baru.
- (6) Perubahan alamat perusahaan atau direksi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. salinan surat keputusan izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;

- c. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - e. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 - f. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan berupa buku uji/kartu lulus uji kendaraan yang masih berlaku.
- (7) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilengkapi dengan persyaratan administrasi tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam surat keputusan izin angkutan sewa khusus.
- (8) Penggantian kendaraan atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut :
- a. kendaraan baru;
 - b. kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih; atau
 - c. kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 24

- (1) Perusahaan Angkutan Umum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepada Pemberi izin.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.
- (3) Bentuk dan formulir permohonan izin Angkutan Sewa

Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kajian teknis.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas diterima.
- (4) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (6) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh pemberi izin.
- (7) Surat rekomendasi pengajuan peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses:
- a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kepolisian Republik Indonesia kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.
- (9) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus kepada Pemberi izin.
- (10) Pemohon dalam mengajukan surat permohonan penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk :
- a. kendaraan baru, sebagai berikut :
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut :
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu uji yang masih berlaku.
- (11) Pemberi izin menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas di terima.

Pasal 26

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, disampaikan

kepada Pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.

- (2) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan kajian teknis.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang telah di perbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas di terima.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Pasal 27

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melengkapi persyaratan administrasi, pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kepada pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan kajian teknis diterima.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin

memberikan kartu pengawasan yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas di terima.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan kajian teknis diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas di terima.
- (4) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (6) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pemohon yang dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Pemberi izin.
- (7) Surat rekomendasi pengajuan peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor

kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi peruntukan kendaraan bermotor umum dan kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon mengajukan proses:
- a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Kepolisian Republik Indonesia kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.
- (9) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus kepada Pemberi Izin.
- (10) Pemohon dalam mengajukan surat permohonan penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk :
- a. kendaraan baru, sebagai berikut :
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
 - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut :
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu uji yang masih berlaku.
- (11) Pemberi izin menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas diterima.

Pasal 29

- (1) Dalam hal permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) huruf b telah memenuhi persyaratan pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis dari Kepala Dinas

- (2) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan kajian teknis diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan Pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas diterima.

Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan kajian teknis diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas diterima.
- (4) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberikan, pemohon wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang lama.

Pasal 31

- (1) Dalam hal permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d telah memenuhi persyaratan, pemberi izin membuat surat permintaan kajian teknis kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat kajian teknis terhadap

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Pemberi izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan kajian teknis diterima.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Pemberi izin memberikan dokumen penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat kajian teknis Kepala Dinas diterima, berupa surat keputusan pelaksanaan izin Angkutan Sewa Khusus dan kartu pengawasan.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 32

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
- d. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya;
- e. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
- f. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
- g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak - anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
- i. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi izin dan Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib mengikuti ketentuan dibidang perusahaan angkutan umum.
- (2) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 34

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dilarang:

- a. beroperasi di luar wilayah operasi yang telah ditetapkan;
- b. menaikkan penumpang di jalan tanpa menggunakan aplikasi; dan
- c. mengoperasikan kendaraan yang tidak memiliki izin Angkutan Sewa Khusus.

Paragraf 3

Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 merupakan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi :
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; dan
 - c. Pelanggaran berat
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara

berkala;

- d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
- e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang di operasikan;
- f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan angkutan umum;
- g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
- h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang di persamakan dengan tiket.

(4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pelanggaran besaran tarif angkutan;
- b. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan dan tanggung jawab pengangkut;
- c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
- d. tidak mengembalikan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan dan/atau Kartu Pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
- e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan;
- f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
- g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan.

(5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
- b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan, untuk Angkutan Sewa Khusus;
- c. Tidak memasang tanda khusus kendaraan kendaraan

- angkutan sewa khusus;
- d. memalsukan dokumen kendaraan dan tanda khusus;
 - e. mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, STNK, buku uji/kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - g. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - h. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Pasal 36

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat peringatan kedua tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pemegang izin tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Dalam hal pemegang izin tidak melakukan perbaikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan sewa khusus yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
 - c. melaporkan perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan Sewa Khusus kepada Gubernur;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemberi Izin dan Kepala Dinas.
- (4) Pemberi Izin dan Kepala Dinas mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Izin Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi peraturan di bidang angkutan jalan secara berkala.

Pasal 41

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan oleh

Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (2) Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 42

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan di:
 - a. tempat wisata;
 - b. ruas jalan;
 - c. tempat keberangkatan;
 - d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak memenuhi standar pelayanan minimal, maka Pemberi izin dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang diberikan kepada perusahaan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan perizinan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen kendaraan;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. tarif untuk Angkutan Sewa Khusus;

- e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tanda bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Ketentuan terkait penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Penyedia layanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang telah beroperasi, wajib mengurus izin Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini
- (2) Dalam hal Penyedia layanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memiliki izin wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dan penggunaan aplikasi.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 17 JANUARI 2018

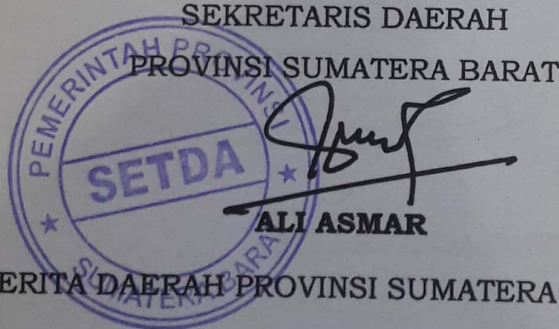
GUBERNUR SUMATERA BARAT



Diundangkan di Padang

pada tanggal 17 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1

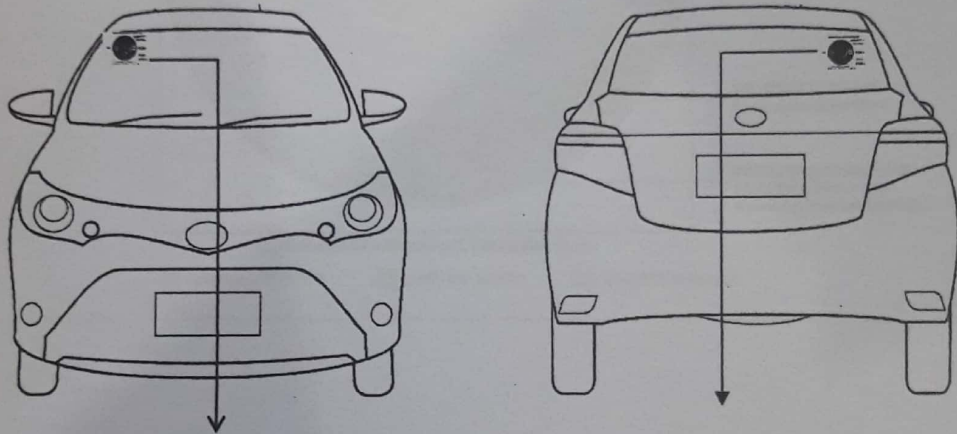
LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TENTANG :
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

CONTOH 1.a :

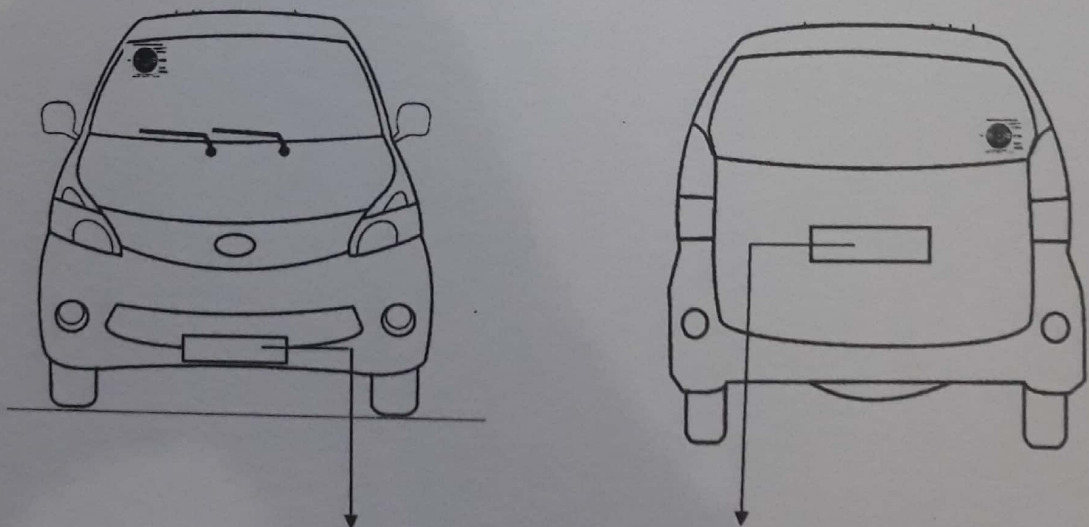
STIKER TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Gambar 1. a1.

CONTOH PENEMPATAN STIKER TANDA KHUSUS



STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS



TANDA NOMOR KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Gambar 1.a2 :

CONTOH STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS

DESAIN STIKER ANGKUTAN SEWA KHUSUS



LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
 MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
 DI PROVINSI SUMATERA BARAT

FORMULA PERHITUNGAN KEBUTUHAN ANGKUTAN

I. MODEL PERMINTAAN DAN PENAWARAN (*DEMAND AND SUPPLY MODEL*)

$$\sum \text{Kend} = \frac{\text{(jumlah perjalanan per-hari : okupansi)}}{\text{Rit per hari}}$$

Rit per hari = jam operasi (RTT)

RTT = WL + WP + WT

Keterangan :

1. WL adalah waktu menuju ke lokasi
 Diambil dari toleransi maksimal waktu menunggu penumpang yang memesan Angkutan Sewa Khusus melalui aplikasi.
2. WP adalah waktu menunggu penumpang
 Waktu menunggu pengemudi untuk mendapatkan pengguna jasa angkutan sewa khusus.
3. WT adalah waktu tempuh (jarak dibagi kecepatan)

II. MODEL DINAMIS (*DYNAMIC MODEL*)

$$N = \left(\frac{A}{V} + \mu^p Q_p \right) \frac{24}{h}$$

$$= \left(\frac{A}{V} + \mu^p Q_p \right) \frac{24}{h}$$

Dimana :

- N = Kuota Angkutan Sewa Khusus (Unit)
 Tw = Waktu tunggu penumpang rata-rata pada jam sibuk (Jam)
 h = Waktu Kerja Rata-rata Pengemudi ASK Per Hari (Jam)
 γ = Parameter Perbandingan Antara Area Pelayanan Dan Waktu Tunggu
 μ^p = Rata-rata lama Perjalanan Menggunakan Angkutan Sewa Khusus (Jam)

- Q_p = Jumlah Penumpang Saat Jam Sibuk
 A = Area Pelayanan (km²)
 V = Kecepatan Rata-rata Kendaraan (Km/jam)

III. MODEL REGRESI (*REGRESSION MODEL*)

$$\Sigma \text{KK} = 0,0110 X_1 + 18,4785 X_2 - 16.967,8814$$

$$\Sigma \text{KASK} = \Sigma \text{KK} - \Sigma \text{KE}$$

Ket :

- Σ KK = jumlah kebutuhan kendaraan
 Σ KE = jumlah kendaraan ekoloting
 Σ KASK = jumlah kebutuhan angkutan sewa khusus
 X₁ = jumlah penduduk
 X₂ = PDRB per kapita

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TENTANG :
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS MENGGUNAKAN
APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

CONTOH 3.a :

DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI WILAYAH OPERASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor :

Memberikan izin kepada :

1. Nama :
- Nama Penanggung Jawab :
- NPWP :
- Alamat :
2. Jenis Izin :
3. Wilayah operasi :
4. Jumlah Kendaraan :
5. Penyedia Aplikasi :
6. Sifat Pelayanan :
7. Masa Berlaku :
8. Dasar Pertimbangan :

Diterbitkan di Padang
pada Tanggal

**An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

(.....)

CONTOH 3.b :

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR:.....

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI WILAYAH OPERASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek, dan Peraturan Gubernur Nomor tanggal tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Provinsi Sumatera Barat, diperlukan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek (Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi);
 - surat permohonan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (taksi online) PT / KOPERASI tanggal.....;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594);
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor: 108);
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor : 72);
 - Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570 - 8 - 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-734-2014;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor : 47);
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Sewa Khusus dari PT/Koperasi..... tanggal.....;
 -;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (ONLINE) KEPADA PT/KOPERASI**
- KESATU : Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek (Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Taksi Online) :
- Nama Perusahaan :
Nomor Induk Perusahaan :
Nama Pimpinan :
Alamat Perusahaan :
- KEDUA : Bahwa PT/Koperasi wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilayani dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi sampai dengan tanggal.....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

**a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

(.....)

Salinan Keputusan inidisampaikan kepada Yth. :

1.
2.
3.

CONTOH 3.c :

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR:.....

TENTANG
PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI WILAYAH OPERASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek, dan Peraturan Gubernur Nomortanggaltentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Provinsi Sumatera Barat, diperlukan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek (Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi);
- b. bahwa maksud permohonan adalah untuk realisasi sebanyakkendaraan sesuai dengan surat persetujuan izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Provinsi Sumatera Barat kepada PT/KOPERASI.....tanggal.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor: 108);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor : 72);
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570 - 8 - 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-754-2014;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor : 47);
- Memperhatikan 1. Surat Permohonan dari.....nomor.....tanggal.....
2. Pertimbangan dari.....perihal.....nomor.....tanggal....
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
- PERTAMA** : **KEPUTUSAN TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KEPADA PT/KOPERASI**
- KETIGA** : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Nomor....., tanggal.... tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi kepada PT/KOPERASI.....
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilayani dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi sampai dengan tanggal
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[.....]

CONTOH 3.d :

**KARTU PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Nomor :.....**

Berdasarkan Keputusan Nomor : tanggal
..... tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis
Teknologi Informasi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat, diberikan Kartu Pengawasan kepada : PT/KOPERASI yang
dipimpin olehdi, yang berlaku sejak tanggal sampai tanggal
....., untuk mengangkut penumpang pada wilayah operasi :

.....
Untuk Keperluan tersebut dipergunakan mobil penumpang sebagai berikut :

- | | | | |
|--------------------------|---|------------------|---|
| 1. Tanda Nomor Kendaraan | : | 8. Nomor Mesin | : |
| 2. Nomor Uji Kendaraan | : | 9. Nomor Rangka | : |
| 3. Tanggal Uji Berkala | : | 10. Tahun | : |
| 4. Daya Angkut Orang | : | 11. ID Kendaraan | : |
| 5. MST | : | | |
| 6. Jenis Kendaraan | : | | |
| 7. Merk Kendaraan | : | | |

**Diberikan di Padang
pada tanggal**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

(.....)

CONTOH 3. e :

Kop Perusahaan

SURAT PERNYATAAN

TENTANG

KESANGGUPAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KHUSUSNYA PELAYANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI WILAYAH OPERASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir:
4. Agama :
5. Nomor Identitas (KTP) :
6. Alamat :
7. Status : Pimpinan/Penanggujawab Perusahaan
8. Alamat Perusahaan :

Saya selaku Pimpinan dan Penanggungjawab Perusahaan PT/Koperasi..... dengan ini menyatakan kami sanggup untuk mematuhi semua ketentuan perundang - undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum khususnya dalam pelayanan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dengan Wilayah Operasi dalam Provinsi Sumatera Barat.

Apabila Perusahaan kami terbukti tidak mampu menyelesaikan seluruh persyaratan dalam waktu yang ditentukan, melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengoperasian kendaraan, maka dokumen perizinan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dengan wilayah operasi dimaksud diatas yang dialokasikan kepada Perusahaan kami bersedia untuk dicabut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang ,
pembuat pernyataan

Materai Rp 6.000

(Pimpinan Perusahaan)

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
 MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
 DI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERMOHONAN
 IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
 MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

KOP
NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)
 Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan
 Angkutan Orang Sewa Khusus

Yth. Kepada
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Provinsi Sumatera Barat

Di

PADANG

- Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek, dan Peraturan Gubernur Nomortanggaltentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Provinsi Sumatera Barat, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, dengan data sebagai berikut:

Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama/Notaris, Nomor dan Tanggal)
 - 5) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) :
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 - a. Nomor Telepon & Faksimili :
 - b. E-mail : - 7) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk :
 - a. Luas Areal Parkir Armada :
 - b. Nomor Telepon & Faksimili :
 - c. E-mail :
- Adapun pelayanan angkutan sewa khusus yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

- Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

- a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - k. Rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
 5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PT/KOPERASI

Materai Rp. 6000

(.....)
PIMPINAN PERUSAHAAN

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
3.

CONTOH 3.b :

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Contoh 5.a

PERINGATAN ATAS PELANGGARAN IZIN

KOP DINAS

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor : Padang,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Peringatan atas Pelanggaran Izin
Operasi Angkutan Sewa Khusus

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan
.....
di
(domisili perusahaan)
.....

1. Merujuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal bersama ini disampaikan bahwa kami tidak dapat mengabulkan/ menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Demikian untuk menjadikan maklum.

**a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

(.....)

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.....

CONTOH 5.b

**PEMBEKUAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

KOP DINAS

Alamat lengkap Nomor Telepon

KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN

TENTANG

**PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS.
PT/KOPERASI**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek, dan Peraturan Gubernur Nomortanggaltentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Provinsi Sumatera Barat, diperlukan pembinaan yang berupa penerapan sanksi administrative berupa pembekuan izin penyelenggaraan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek;
5. Peraturan Gubernur Nomortanggaltentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Provinsi Sumatera Barat.
6.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan oleh PT/Koperasi Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSANTENTANG PEMBEEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS PT/KOPERASI**
- KESATU** : Menjatuhkan sanksi administratif Kepada PT/KOPERASI.....berupa pembekuan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ini berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal
- KETIGA** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Gubernur Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

(.....)

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.....
4.

CONTOH 5.c

**PENCABUTAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

KOP DINAS

Alamat lengkap Nomor Telepon

KEPUTUSAN
NOMOR 1 TAHUN

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS.
PT/KOPERASI**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek, dan Peraturan Gubernur Nomortanggaltentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Provinsi Sumatera Barat, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administrative berupa pencabutan izin penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek;
5. Peraturan Gubernur Nomortanggaltentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online) di Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan oleh PT/Koperasi Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSANTENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS PT/KOPERASI**
- KESATU** : Menjatuhkan sanksi administratif Kepada PT/KOPERASI.....berupa pencabutan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus terhadap sebagian/semuruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Gubernur Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

(.....)

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.....
4.